

Dialektika pilar kekuasaan dinasti utsmani: analisis transformasi institusional dari puncak kejayaan menuju keruntuhan

Muhamad Syafron Amar

Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250101110011@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Dinasti Utsmani, Dialektika
Institusional, Janissari, Kanun,
Institutional Decay.

Keywords:

Ottoman Dynasty,
Institutional Dialectics,
Janissaries, Kanun,
Institutional Decay.

ABSTRAK

Studi sejarah Dinasti Utsmani umumnya terjebak dalam pembagian dikotomis antara fase kejayaan dan kemunduran. Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan pendekatan dialektika institusional untuk menganalisis bagaimana pilar-pilar kejayaan Utsmani bertransformasi menjadi agen pembusukan internal (institutional decay). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi pustaka dengan analisis historis-komparatif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pilar utama kejayaan—yaitu integrasi hukum (Kanun-Syariat), militer profesional Janissari, dan birokrasi meritokratis—mengalami rigiditas dan stagnasi struktural pasca-pemerintahan Sultan Suleiman I. Institusi Janissari bermutasi menjadi ancaman domestik

yang intervensionis, birokrasi bergeser menjadi ruang patronase dan korupsi, serta sistem hukum gagal merespons modernitas politik. Pembusukan internal ini diperparah oleh katalisator eksternal, meliputi pergeseran jalur geoeonomi global ke Samudra Atlantik, ketertinggalan teknologi militer terhadap Eropa, persaingan regional dengan Safawiyah, serta gelombang nasionalisme di Balkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa runtuhnya Utsmani pada tahun 1924 bukan sekadar akibat agresi luar, melainkan hasil akumulasi kontradiksi struktural yang gagal beradaptasi dengan perubahan zaman.

ABSTRACT

The study of the history of the Ottoman Dynasty is generally stuck in a dichotomous division between the phases of glory and decline. This article offers a new perspective by using an institutional dialectic approach to analyze how the pillars of Ottoman glory transformed into agents of institutional decay. The research method used is qualitative literature study with historical-comparative-analytical analysis. The results show that the three main pillars of glory—the integration of the law (Canon-Sharia), the Janissarian professional military, and the meritocratic bureaucracy—experienced structural rigidity and stagnation after the reign of Sultan Suleiman I. The Janissary institution mutated into an interventionist domestic threat, the bureaucracy shifted into a space of patronage and corruption, and the legal system failed to respond to political modernity. This internal decay was exacerbated by external catalysts, including the shift in the path of global geoeconomics to the Atlantic Ocean, the lagging behind of military technology towards Europe, regional competition with the Safavids, and the wave of nationalism in the Balkans. This article concludes that the collapse of the Ottomans in 1924 was not simply the result of external aggression, but the result of an accumulation of structural contradictions that failed to adapt to the changing times.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Runtuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M menjadi salah satu titik balik paling traumatis dalam sejarah peradaban Islam. Kehancuran tersebut tidak hanya mengakhiri supremasi politik Abbasiyah, tetapi juga meluluhlantakkan pusat-pusat ilmu pengetahuan, jaringan ekonomi, dan stabilitas sosial dunia Islam. Gelombang destruksi yang kemudian diperparah oleh ekspansi Timur Lenk pada abad ke-14 menyebabkan umat Islam mengalami krisis multidimensional yang melahirkan kemunduran politik, fragmentasi otoritas, serta stagnasi intelektual. Dalam situasi inferioritas kolektif tersebut, kemunculan Dinasti Utsmani di Anatolia menjadi titik konsolidasi baru yang berhasil menghimpun kembali kekuatan politik Islam dalam bentuk imperium yang terorganisasi dan ekspansif. Berawal dari sebuah beylik kecil di bawah Osman I pada akhir abad ke-13, Dinasti Utsmani berkembang menjadi kekuatan transregional yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Dinasti ini secara perlahan membangun kekuatan melalui kombinasi antara ekspansi militer, integrasi sosial, dan legitimasi keagamaan yang kuat (Abdurrahman, 2011). Momentum paling menentukan terjadi ketika Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 M, sebuah peristiwa yang tidak hanya menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, tetapi juga mengukuhkan Utsmani sebagai pusat peradaban Islam baru yang memiliki legitimasi geopolitik dan simbolik yang sangat kuat (İnalçık, 1994).

Keberhasilan Dinasti Utsmani tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mereka membangun struktur kekuasaan yang relatif stabil dan adaptif. Pada masa Sultan Suleiman al-Qanuni, Utsmani mencapai puncak kejayaan politik dan administratif melalui penguatan birokrasi, supremasi militer Janissari, serta penerapan hukum Kanun yang menopang stabilitas negara (Shaw & Shaw, 1976). Sistem pemerintahan yang terpusat memungkinkan imperium mengelola wilayah yang sangat luas dan multietnis secara efektif. Bahkan, menurut Faruqi (2005), kekuatan Utsmani tidak hanya terletak pada dominasi politik dan militernya, tetapi juga pada kemampuannya membangun kehidupan sosial dan budaya yang dinamis di bawah otoritas kesultanan. Selain kekuatan politik dan militer, Utsmani juga memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi intelektual Islam. Jalur perdagangan dan jaringan ulama yang terbentang dari Timur Tengah hingga Nusantara turut memperkuat posisi Istanbul sebagai pusat dunia Islam. Azra (2004) menjelaskan bahwa hubungan keilmuan antara Timur Tengah dan kawasan Muslim lainnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Islam, termasuk Utsmani, menjadi medium penting bagi transmisi ilmu pengetahuan dan otoritas keagamaan lintas wilayah. Dengan demikian, Utsmani tidak hanya tampil sebagai kekuatan imperial, tetapi juga sebagai simbol persatuan politik dan peradaban Islam pasca keruntuhan Abbasiyah.

Namun demikian, historiografi konvensional sering kali membagi sejarah Utsmani ke dalam dua fase yang dipisahkan secara dikotomis: masa kejayaan dan masa kemunduran. Fase kejayaan dipahami sebagai hasil dari kepemimpinan sultan yang kuat, disiplin militer Janissari, serta efisiensi birokrasi negara. Sebaliknya, fase kemunduran umumnya dijelaskan melalui faktor-faktor eksternal seperti tekanan imperialisme Barat, revolusi industri Eropa, kekalahan militer, dan munculnya sultan-sultan yang dianggap lemah (Lewis, 1961). Perspektif tersebut cenderung memosisikan kemunduran Utsmani

sebagai akibat dari perubahan eksternal semata, seolah-olah institusi internalnya mengalami kemacetan secara tiba-tiba tanpa kontradiksi historis yang mendahuluinya. Padahal, jika ditelaah lebih mendalam, terdapat paradoks historis dalam tubuh institusi Utsmani sendiri. Pilar-pilar yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan imperium justru mengalami transformasi menjadi hambatan struktural ketika berhadapan dengan perubahan zaman. Korps Janissari yang awalnya dibangun sebagai pasukan profesional berbasis meritokrasi perlahan berubah menjadi kelompok konservatif yang menolak reformasi militer modern. Sistem birokrasi yang semula efektif mengalami kemunduran akibat praktik patronase dan korupsi politik. Bahkan hukum dan administrasi negara yang dahulu menjadi instrumen integrasi sosial mulai kehilangan fleksibilitasnya di tengah perubahan ekonomi dan teknologi global (Finkel, 2005)

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika Eropa memasuki era modernitas melalui revolusi ilmu pengetahuan, industrialisasi, dan ekspansi kolonial. Ketimpangan teknologi militer dan ekonomi antara Utsmani dan Barat menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas imperium. Menurut Amin, keterlambatan dunia Islam dalam merespons perkembangan sains dan teknologi modern menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat kemunduran politik Islam pada era modern (Amin, 2010). Dalam konteks Utsmani, upaya reformasi melalui Tanzimat pada abad ke-19 justru memperlihatkan adanya tarik-menarik antara modernisasi dan konservatisme internal negara. Reformasi tersebut bertujuan memperbaiki administrasi, pendidikan, hukum, dan militer, tetapi pada saat yang sama menimbulkan resistensi dari elite lama yang merasa terancam kehilangan privilese politik dan ekonomi (Shaw & Shaw, 1976b)

Dalam konteks tersebut, artikel ini berangkat dari pendekatan dialektika institusional untuk membaca transformasi Dinasti Utsmani. Pendekatan ini menempatkan institusi bukan sebagai struktur yang statis, melainkan sebagai entitas dinamis yang mengalami kontradiksi internal dalam proses sejarahnya. Artikel ini menawarkan tesis bahwa faktor-faktor kemunduran Utsmani sebenarnya berakar dari struktur institusi kejayaannya sendiri. Dengan demikian, kehancuran Utsmani tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat agresi Barat atau lemahnya kepemimpinan politik, melainkan sebagai hasil dari dialektika antara keberhasilan institusi lama dengan ketidakmampuannya beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik global. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan: *pertama* untuk menganalisis bagaimana transformasi institusional Dinasti Utsmani berlangsung dari masa kejayaan menuju keruntuhan. *Kedua*, mengkaji perubahan fungsi dan karakter pilar-pilar kekuasaan Utsmani—militer, birokrasi, hukum, dan legitimasi religius. *Ketiga*, mengkaji bagaimana interaksinya dengan tekanan eksternal modernitas Barat hingga runtuhnya kekhalifahan pada awal abad ke-20. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam studi sejarah politik Islam, khususnya terkait hubungan dialektis antara kejayaan institusi dan proses disintegrasi sebuah imperium.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis dengan perspektif dialektika institusional. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis

perubahan fungsi institusi-institusi utama Utsmani secara dinamis, khususnya hubungan kontradiktif antara pilar kejayaan dan faktor-faktor internal yang kemudian mendorong kemunduran imperium. Sumber data penelitian terdiri atas data primer meliputi karya Bernard Lewis, Halil İnalcık, Stanford J. Shaw, Caroline Finkel, Donald Quataert, dan Suraiya Faroqhi, serta data sekunder berupa buku sejarah peradaban Islam, karya akademik mengenai Kesultanan Utsmani, jurnal ilmiah, arsip historis, literatur internasional yang relevan dengan tema institusionalisme dan sejarah politik Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur (*literature review*). Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber yang membahas perkembangan politik, militer, hukum, ekonomi, dan birokrasi Dinasti Utsmani sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Data-data tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan tema transformasi institusional serta kemunduran kekuasaan Utsmani. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model historis-komparatif-analitis. Analisis historis digunakan untuk merekonstruksi perkembangan institusi Utsmani dalam lintasan sejarahnya. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan fungsi dan efektivitas institusi pada masa kejayaan Sultan Suleiman I dengan periode stagnasi dan kemunduran pada abad ke-18 hingga ke-20. Sementara itu, analisis dialektis digunakan untuk mengidentifikasi kontradiksi internal yang menyebabkan institusi-institusi tersebut mengalami pembusukan struktural (*institutional decay*) ketika berhadapan dengan modernitas Barat, revolusi industri, nasionalisme Balkan, dan perubahan geopolitik global.

Pembahasan

Konstruksi Pilar Kejayaan Dinasti Utsmani

Dinasti Utsmani yang didirikan oleh Utsman I pada akhir abad ke-13 berkembang dari sebuah beylik kecil di Anatolia menjadi imperium transkontinental yang menguasai Asia, Afrika, dan Eropa. Transformasi tersebut tidak hanya ditopang oleh ekspansi militer, tetapi juga oleh konstruksi institusional yang kuat dan adaptif. Hal ini menjadikan Utsmani sebagai salah satu kekuatan politik Islam terbesar pasca-runtuhnya Baghdad akibat invasi Mongol. İnalcık menegaskan bahwa keberhasilan Utsmani terletak pada kemampuannya membangun sintesis antara tradisi Islam, warisan Bizantium, dan sistem administrasi Turki-Mongol (İnalcık, 1973). Pandangan serupa dikemukakan Goffman yang menyebut Utsmani sebagai “*empire of integration*” karena berhasil menghubungkan dunia Islam dan Eropa dalam sistem politik serta ekonomi yang relatif stabil (Goffman, 2002).

Salah satu pilar utama kejayaan Utsmani adalah integrasi hukum syariat dengan hukum administratif negara (*Kanun*). Pada masa Sultan Suleiman I atau Suleiman al-Qanuni, harmonisasi antara otoritas agama dan kepentingan administratif negara mencapai bentuk paling matang. Sistem hukum ini memungkinkan pengelolaan wilayah yang sangat luas tanpa menghilangkan legitimasi Islam sebagai fondasi negara (İnalcık, 1973). Melalui sistem millet, masyarakat non-Muslim diberi otonomi terbatas dalam urusan agama dan sosial sehingga tercipta stabilitas sosial dalam masyarakat

multikultural (Barkey, 2008). Faroqhi menilai bahwa fleksibilitas administratif ini menjadi salah satu alasan mengapa Utsmani mampu mempertahankan wilayah kekuasaannya selama berabad-abad (Faroqhi, 2004).

Keunggulan kedua terletak pada institusi militer profesional Janissari. Pasukan elit ini direkrut melalui sistem *devshirme*, yaitu pengambilan anak-anak Kristen Balkan untuk dididik menjadi aparat negara dan militer yang loyal kepada sultan. Sistem tersebut menciptakan tentara profesional yang disiplin dan bebas dari kepentingan aristokrasi lokal (Shaw & Shaw, 1976b). Menurut Amiruddin dkk., kekuatan Janissari menjadi instrumen utama ekspansi global Utsmani, termasuk keberhasilan penaklukan Konstantinopel tahun 1453 M yang mengubah konstelasi politik dunia Islam dan Eropa (Amiruddin et al., 2024). Lewis menambahkan bahwa kombinasi antara organisasi militer yang modern dan penggunaan artileri berat menjadikan Utsmani unggul dibanding kerajaan-kerajaan Eropa pada abad ke-15 hingga ke-16 (Lewis, 1961).

Selain aspek hukum dan militer, kejayaan Utsmani juga dibangun di atas birokrasi meritokratis dan kekuatan ekonomi strategis. Jabatan administratif diberikan berdasarkan kemampuan dan loyalitas kepada negara, bukan semata-mata faktor keturunan (Findley, 1980). Sistem timar memungkinkan distribusi tanah kepada aparat militer untuk menjamin produktivitas agraria sekaligus mencegah munculnya feodalisme ekstrem sebagaimana di Eropa (İnalçık, 1973). Di sisi lain, posisi geografis Utsmani yang menghubungkan jalur perdagangan Timur dan Barat menjadikannya pusat ekonomi internasional yang sangat penting (Pamuk, 2000). Rahmadina dkk. menyebut bahwa kekuatan politik, militer, dan ekonomi ini menjadikan Utsmani sebagai salah satu pilar utama peradaban Islam klasik bersama Safawiyah dan Mughal (Rahmadina et al., 2024). Keberhasilan institusional tersebut membawa Utsmani mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16. Namun, sebagaimana dijelaskan Al Munawar, struktur kekuasaan yang awalnya progresif perlahan mengalami rigiditas akibat ketidakmampuan beradaptasi terhadap modernitas politik dan perubahan global (Al Munawar, 2025). Dalam perspektif dialektika institusional, institusi yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan justru mulai melahirkan kontradiksi internal yang menjadi benih kemunduran imperium.

Dialektika Institusional: Ketika Pilar Kejayaan Bermutasi Menjadi Agen Pembusukan Internal

Pasca-wafatnya Sultan Suleiman I pada 1566 M, Dinasti Utsmani mulai mengalami stagnasi institusional yang perlahan menggerogoti fondasi kejayaannya sendiri. Dalam perspektif dialektika institusional, institusi yang pada awalnya menjadi sumber kekuatan justru mengalami transformasi menjadi agen pembusukan internal akibat kegagalan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik global. Al Munawar menjelaskan bahwa struktur kekuasaan Utsmani mengalami rigiditas karena relasi kuasa yang sebelumnya produktif berubah menjadi mekanisme dominasi yang mempertahankan status quo dan menolak modernisasi. Akibatnya, institusi militer, birokrasi, dan hukum kehilangan fleksibilitas yang dahulu menjadi keunggulan utama imperium (Al Munawar, 2025).

Mutasi Institusi Militer: Janissari dari Perisai Menjadi Ancaman

Pada masa kejayaan, pasukan Janissari merupakan simbol profesionalisme militer Utsmani. Direkrut melalui sistem *devshirme*, mereka dididik dengan disiplin tinggi, loyal kepada sultan, serta menjadi pelopor penggunaan senjata api modern di dunia Islam (İnalçık, 1973). Amiruddin dkk. menegaskan bahwa kekuatan Janissari menjadi faktor utama keberhasilan ekspansi Utsmani ke Konstantinopel, Balkan, hingga Afrika Utara (Amiruddin et al., 2024). Bahkan Lewis menyebut Janissari sebagai salah satu institusi militer paling efektif di dunia pra-modern karena mampu mengintegrasikan teknologi artileri dengan organisasi tempur yang sistematis (Lewis, 1961). Namun, kekuatan besar yang dimiliki Janissari perlahan berubah menjadi ancaman domestik. Sejak abad ke-17, korps ini mulai kehilangan karakter profesionalnya akibat keterlibatan dalam politik istana dan perebutan kekuasaan (Shaw & Shaw, 1976b). Hanioglu menjelaskan bahwa Janissari tidak lagi sekadar pasukan elit, melainkan kelompok kepentingan politik yang sering menentukan suksesi sultan melalui tekanan dan pemberontakan. Mereka bahkan menolak reformasi militer yang dianggap mengancam privilese ekonominya (Hanioglu, 2008).

Quataert mencatat bahwa Janissari berkembang menjadi kelompok semi-ekonomi yang terlibat dalam perdagangan, pungutan liar, dan praktik korupsi. Akibatnya, disiplin militer melemah drastis dan efektivitas tempur menurun (Quataert, 2005). Dalam konteks ini, dialektika institusional terlihat jelas: institusi yang awalnya dibangun untuk menjaga stabilitas negara justru berubah menjadi sumber instabilitas internal. Finkel (2005) menambahkan bahwa pemberontakan Janissari terhadap Sultan Selim III dan Sultan Mahmud II memperlihatkan bagaimana militer Utsmani telah bertransformasi menjadi hambatan utama modernisasi negara.

Dekadensi Birokrasi: Dari Meritokrasi ke Patronase dan Korupsi

Selain militer, birokrasi Utsmani juga mengalami dekadensi struktural. Pada masa klasik, birokrasi Utsmani dikenal sebagai salah satu sistem administrasi paling efisien di dunia Islam. Jabatan negara diberikan berdasarkan kompetensi dan loyalitas kepada negara, bukan garis keturunan (Findley, 1980). Sistem ini memungkinkan lahirnya administrator profesional yang mampu mengelola wilayah imperium yang sangat luas. Yatim menyebut bahwa meritokrasi birokrasi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Utsmani mempertahankan stabilitas politik selama berabad-abad. Akan tetapi, sejak abad ke-17 sistem tersebut mulai bergeser menjadi patronase politik berbasis nepotisme dan suap (Yatim, 2013). Abdurrahman menjelaskan bahwa banyak jabatan strategis diperjualbelikan kepada elite yang memiliki kedekatan dengan istana. Praktik ini menyebabkan menurunnya kualitas aparatur negara dan meningkatnya korupsi administratif (Abdurrahman, 2011). Menurut Findley, birokrasi Utsmani mengalami “*over-centralization without efficiency*”, yakni sentralisasi kekuasaan yang tidak diimbangi efektivitas administrasi (Findley, 2010).

Kemerosotan moral elite turut memperparah situasi. Faroghi menunjukkan bahwa gaya hidup mewah di kalangan pejabat dan aristokrasi istana memicu pemborosan fiskal negara (Faroghi, 2005). Pamuk menambahkan bahwa krisis moneter akibat inflasi dan penurunan pendapatan perdagangan memperbesar praktik korupsi karena pejabat

berusaha mempertahankan privilese ekonominya. Dalam perspektif dialektis, birokrasi yang sebelumnya menopang efisiensi negara berubah menjadi ruang pembusukan struktural yang menghambat reformasi dan mempercepat kemunduran imperium (Pamuk, 2000).

Stagnasi Hukum dan Kegagalan Adaptasi Sosio-Ekonomi

Pilar kejayaan lain Utsmani adalah sistem hukum Kanun dan millet yang mampu mengelola masyarakat multietnis secara relatif stabil. Pada masa Suleiman I, harmonisasi antara syariat dan Kanun menciptakan fleksibilitas administratif yang efektif bagi pemerintahan imperium (İnalçık, 1994). Barkey menilai bahwa sistem millet menjadi model toleransi politik yang memungkinkan komunitas non-Muslim mempertahankan identitas sosial dan agamanya tanpa mengancam stabilitas negara (Barkey, 2008). Namun, ketika Eropa memasuki era Revolusi Industri dan modernitas politik, sistem kelembagaan Utsmani gagal beradaptasi. Mardin menjelaskan bahwa munculnya gagasan nasionalisme, konstitusionalisme, dan demokrasi di Eropa menciptakan tantangan baru yang tidak mampu dijawab secara cepat oleh struktur politik Utsmani (Mardin, 2000). Otonomi dalam sistem millet yang sebelumnya menjadi instrumen integrasi justru dimanfaatkan kelompok etnis Balkan untuk membangun identitas nasional dan memisahkan diri dari kekuasaan pusat (Zürcher, 2004).

Anscombe menilai bahwa perubahan orientasi politik masyarakat Balkan memperlihatkan kegagalan Utsmani dalam mentransformasikan identitas kekhalifahan menjadi identitas politik modern yang lebih inklusif (Anscombe, 2014). Di sisi lain, stagnasi ekonomi akibat ketertinggalan industrialisasi membuat Utsmani semakin bergantung pada modal dan utang Eropa (Pamuk, 2000). A'laa dkk., menyebut bahwa ketidakmampuan negara menyesuaikan diri dengan modernitas menyebabkan peradaban Islam Utsmani memasuki fase disintegrasi sosial-politik yang berujung pada transisi menuju Republik Turki sekuler (A'laa et al., 2026). Dalam konteks intelektual dan keagamaan, Azra menunjukkan bahwa melemahnya otoritas politik Utsmani turut memengaruhi jaringan ulama dunia Islam, termasuk di Nusantara, karena Istanbul tidak lagi mampu memainkan peran sentral sebagai pusat kekhalifahan global. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemunduran Utsmani bukan sekadar keruntuhan politik, tetapi juga krisis peradaban yang memengaruhi dunia Islam secara luas (Azra, 2004).

Dengan demikian, dialektika institusional dalam Dinasti Utsmani memperlihatkan bahwa sumber kejayaan suatu imperium dapat berubah menjadi penyebab kehancurannya ketika institusi gagal beradaptasi terhadap perubahan zaman. Janissari berubah dari penjaga negara menjadi ancaman politik, birokrasi meritokratis berubah menjadi ruang patronase dan korupsi, sedangkan sistem hukum serta sosial yang dahulu fleksibel mengalami stagnasi menghadapi modernitas dan nasionalisme. Kontradiksi internal inilah yang secara perlahan mempercepat proses institutional decay dalam tubuh Dinasti Utsmani.

Katalisator Eksternal Keruntuhan

Kemunduran Dinasti Utsmani tidak dapat dilepaskan dari tekanan eksternal yang semakin kompleks sejak abad ke-17. Akan tetapi, tekanan tersebut menjadi destruktif

karena terjadi bersamaan dengan pembusukan institusional internal (*institutional decay*). Quataert menjelaskan bahwa Utsmani sebenarnya masih memiliki sumber daya besar, tetapi kelemahan birokrasi dan stagnasi militer menyebabkan negara gagal merespons perubahan global secara efektif (Quataert, 2005). Salah satu faktor eksternal utama adalah pergeseran geoeonomi dunia akibat penemuan jalur perdagangan laut baru oleh bangsa Eropa. Jalur perdagangan internasional yang sebelumnya melewati Timur Tengah dan Mediterania mulai beralih ke Samudra Atlantik. Akibatnya, pendapatan Utsmani dari perdagangan internasional menurun drastis (Pamuk, 2000). Faroqhi menambahkan bahwa perubahan arus perdagangan global ini mengurangi posisi strategis Istanbul sebagai pusat ekonomi dunia dan memicu krisis fiskal berkepanjangan (Faroqhi, 2004).

Di bidang militer, Utsmani mulai mengalami ketertinggalan teknologi dibandingkan negara-negara Eropa yang memasuki era revolusi industri dan modernisasi persenjataan. Hanioglu menyebut bahwa stagnasi institusi Janissari membuat militer Utsmani sulit beradaptasi dengan sistem perang modern (Hanioglu, 2008). Kekalahan demi kekalahan dari Rusia dan Austria memperlihatkan menurunnya superioritas militer Utsmani yang sebelumnya sangat disegani (Lewis, 1961). Bahkan, menurut Shaw dan Shaw, reformasi militer yang dilakukan pada abad ke-19 sering mendapat perlawanan dari kelompok konservatif Janissari sehingga memperlambat modernisasi negara (Shaw & Shaw, 1976a). Tekanan eksternal juga muncul dalam bentuk konflik ideologis dan politik regional. Persaingan panjang dengan Dinasti Safawi di Persia menguras energi militer dan finansial negara selama berabad-abad (Anscombe, 2014). Selain itu, kebangkitan nasionalisme di Balkan yang dipengaruhi ide-ide Eropa modern memicu gelombang pemberontakan daerah-daerah taklukan Utsmani. Zürcher menjelaskan bahwa nasionalisme etnis secara bertahap menghancurkan identitas politik multietnis yang selama ini menjadi fondasi kekaisaran (Zürcher, 2004). Dalam konteks akhir kekuasaan Utsmani, A'laa dkk., menilai bahwa transisi menuju Republik Turki menunjukkan kegagalan struktur kekhalifahan dalam mempertahankan legitimasi politik di tengah arus sekularisasi dan modernitas Barat (A'laa et al., 2026).

Situasi tersebut diperparah oleh meningkatnya intervensi Barat terhadap wilayah-wilayah Muslim Utsmani. Hayah dkk., menunjukkan bahwa kolonialisme Barat tidak hanya menghancurkan kekuatan politik Utsmani, tetapi juga melahirkan resistensi intelektual dan sastra Islam yang merefleksikan krisis identitas umat Islam pada akhir era kekhalifahan (Hayah et al., 2025). Dalam perspektif yang lebih luas, Alfikri dan Fadil menilai bahwa keruntuhan Utsmani menjadi titik penting dalam perubahan konsep kekhalifahan menuju sistem negara-bangsa modern di dunia Islam (Alfikri & Fadil, 2024). Dengan demikian, runtuhnya Dinasti Utsmani pada tahun 1924 bukan semata akibat kekalahan militer eksternal, melainkan hasil akumulasi kontradiksi internal dan tekanan global yang saling berinteraksi. Institusi-institusi yang dahulu menopang kejayaan—hukum, militer, dan birokrasi—mengalami stagnasi struktural sehingga gagal menjawab tantangan modernitas, nasionalisme, dan kapitalisme global.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan: *pertama* dalam dimensi militer, Janissari yang pada masa klasik diagungkan sebagai perisai utama imperium dan simbol profesionalisme tempur, secara dialektis bermutasi menjadi ancaman domestik terbesar bagi kelangsungan takhta. Sejak abad ke-17, korps elit yang semula disiplin ini kehilangan karakter militernya akibat penetrasi ke dalam aktivitas ekonomi ilegal, pungutan liar, dan korupsi sistemis. Alih-alih menjadi pelindung kedaulatan, Janissari bertransformasi menjadi kelompok kepentingan politik konservatif yang aktif mengintervensi kesuksesan kesultanan melalui pemberontakan, sekaligus menjadi barikade utama yang menjatuhkan setiap upaya reformasi dan modernisasi militer modern di dalam daulah.

Kedua, pembusukan internal tersebut berjalan selaras dengan dekadensi institusi birokrasi Utsmani yang mengalami pergeseran radikal dari sistem meritokrasi menuju jaringan patronase yang korup. Jabatan-jabatan strategis yang dahulunya diisi oleh para administrator cakap berdasarkan kompetensi, mulai diperjualbelikan demi kedekatan personal dan kelayakan buta terhadap elit istana. Inefisiensi administrasi ini diperparah oleh gaya hidup mewah dan pemborosan fiskal di kalangan aristokrasi, yang pada akhirnya memicu korupsi kronis di tengah hantaman krisis moneter serta inflasi negara yang kian tak terkendali.

Ketiga, di sisi lain, kelenturan hukum Kanun-Syariat dan keberhasilan sistem millet dalam mengelola kemajemukan sosial pada masa keemasan justru mengalami rigiditas struktural yang fatal. Ketika dunia Barat melompat maju melalui Revolusi Industri dan penyebaran paham kebangsaan, institusi hukum dan sosial Utsmani gagal bermutasi menghadapi modernitas zaman. Ruang otonomi dalam sistem millet yang dahulu merekatkan perbedaan, secara ironis berbalik dimanfaatkan oleh kelompok etnis di Balkan sebagai rahim gerakan nasionalisme untuk memisahkan diri. Kegagalan adaptasi sosio-ekonomi ini diperparah oleh stagnasi industri dalam negeri yang memaksa Utsmani terjebak dalam ketergantungan modal dan utang luar negeri Eropa, mempercepat runtuhnya institusi kekhalifahan menuju sistem negara-bangsa modern.

Daftar Pustaka

- A'laa, A. A., Kholil, A., & Fadil. (2026). The Decline of Islamic Civilization in the Transition Era from the Ottoman Sultanate to the Republic of Turkey 1908–1938. *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 5(1), 70–88. <https://repository.uin-malang.ac.id/27089/>
- Abdurrahman, D. (2011). *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern*. Ombak.
- Al Munawar, F. A. (2025). Changing Ottoman Empire's Government System: Michel Foucault's Theory of Power and Modernity. *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 3(1), 150–169. <https://repository.uin-malang.ac.id/23260/>
- Alfikri, F. A. F. S., & Fadil. (2024). Considering Caliphate and Democracy in Islam: A Comparison of the Ottoman Dynasty and the Indonesian State. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 7(1), 1–23. <https://repository.uin-malang.ac.id/20233/>

- Amin, S. M. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Amiruddin, M., Khansaa, S. R. Al, Ulinnuha, I. S., & Febrianti, B. D. H. (2024). Mengguncang Barat, Menyatukan Timur: Pengaruh Kekhalifahan Utsmani dalam Menyatukan Sejarah Dunia Islam. *Ameena Journal*, 2(3), 310–332. <https://repository.uin-malang.ac.id/22204/>
- Anscombe, F. F. (2014). *State, Faith, and Nation in Ottoman and Post-Ottoman Lands*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/state-faith-and-nation-in-ottoman-and-postottoman-lands/6D682ACB4D2D48E91E66D17A0D8C1A64>
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Barkey, K. (2008). *Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/empire-of-difference/0E7A34B9A45C43F2E4B17B4D1C2E7C61>
- Faroghi, S. (2004). *The Ottoman Empire and the World Around It*. I.B. Tauris. <https://www.bloomsbury.com/uk/ottoman-empire-and-the-world-around-it-9781850437154/>
- Faroghi, S. (2005). *Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire*. I.B. Tauris. <https://archive.org/details/subjectsofsultan>
- Findley, C. V. (1980). *Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691052885/bureaucratic-reform-in-the-ottoman-empire>
- Findley, C. V. (2010). *Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity: A History, 1789–2007*. Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300152609/turkey-islam-nationalism-and-modernity/>
- Goffman, D. (2002). *The Ottoman Empire and Early Modern Europe*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/ottoman-empire-and-early-modern-europe/8DAE1B6E6D2F9E11B1B2F4F7D2A1AEE8>
- Hanioğlu, M. Ş. (2008). *A Brief History of the Late Ottoman Empire*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691134529/a-brief-history-of-the-late-ottoman-empire>
- Hayah, I. V., Fitriani, L., & Zuhdy, H. (2025). Resistance Against Colonialism in Abdul Hamid al-Farahi's Poetry During the Fall of the Ottoman Empire. *ISLAH: Journal of Islamic Literature and History*, 6(1), 1–33. <https://repository.uin-malang.ac.id/25301/>
- İnalçık, H. (1973). *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600*. Phoenix Press. <https://www.orientalism.org.uk/ecommerce/the-ottoman-empire-the-classical-age-1300-1600>
- İnalçık, H. (1994). *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600*. Phoenix Press. <https://archive.org/details/ottomanempirecla>

- Lewis, B. (1961). *The Emergence of Modern Turkey*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-emergence-of-modern-turkey-9780198222750>
- Mardin, Ş. (2000). *The Genesis of Young Ottoman Thought*. Syracuse University Press. <https://press.syr.edu/supressbooks/1552/the-genesis-of-young-ottoman-thought/>
- Pamuk, Ş. (2000). *A Monetary History of the Ottoman Empire*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/monetary-history-of-the-ottoman-empire/4A9EFBoE11F9249A4E97E3A5E19A9C7F>
- Quataert, D. (2005). *The Ottoman Empire, 1700–1922*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/ottoman-empire-17001922/1B5A1D49B89C1A5D3A3F1C8D3D5B7E0F>
- Rahmadina, S. F., Harisah, A., Elsanti, N. S., Arisanti, R., & Faruq, U. Al. (2024). Tiga Pilar Utama Peradaban Islam dalam Lintas Sejarah (Turki Usmani, Safawiyah, Fatimiyah). *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 283–286. <https://repository.uin-malang.ac.id/24133/>
- Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (1976a). *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*. Cambridge University Press. <https://archive.org/details/historyofottomanooshaw>
- Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (1976b). *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume II: Reform, Revolution and Republic*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/history-of-the-ottoman-empire-and-modern-turkey/6D53F74B4B6C57EAB36D9A0AB7A39D65>
- Yatim, B. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zürcher, E. J. (2004). *Turkey: A Modern History*. I.B. Tauris. <https://www.bloomsbury.com/uk/turkey-9781845111809/>